



Identifikasi Praktik Politik Kartel dan Kongkalikong di Indonesia: Analisis Komprehensif Terhadap Fenomena Oligarki Politik Kontemporer

Asep Rohmandar¹

¹ President Sundaland Researcher Society

E-mail: rasep7029@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Oktober 01, 2025

Revised Oktober 17, 2025

Accepted Oktober 25, 2025

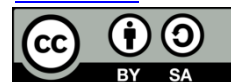
Keywords:

Cartel Politics, Collusion, Contemporary Political Oligarchy

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of political cartels and collusion, which have been the main characteristics of Indonesia's political dynamics since the 1998 Reformation. Using a descriptive qualitative approach, this study analyzes the transformation of oligarchy from the authoritarian New Order regime to the post-Reformation democratic system, which remains rife with collusion between political parties, politicians, businesspeople, and bureaucrats. Research data was obtained through literature studies from various academic sources, media, and research reports related to oligarchy, democratization, and political corruption practices in Indonesia. The analysis results show that political cartel practices and collusion lead to the erosion of democratic quality, the marginalization of public interests, and the delegitimization of the political system. Additionally, these practices strengthen the political-economic oligarchy, which has implications for increasing social-economic inequality. This research emphasizes the importance of institutional reform, strengthening civil society, and political financing transparency as strategic steps to overcome the dominance of political cartels and collusion in Indonesia's political system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Oktober 01, 2025

Revised Oktober 17, 2025

Accepted Oktober 25, 2025

Kata Kunci:

Politik Kartel, Kongkalikong, Oligarki Politik Kontemporer

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena politik kartel dan praktik kongkalikong yang menjadi ciri utama dinamika politik Indonesia pasca-Reformasi 1998. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis transformasi oligarki dari rezim otoriter Orde Baru menuju sistem demokrasi pasca-Reformasi yang ternyata tetap sarat dengan praktik kolusi antarpolisi, politisi, pengusaha, dan birokrat. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber akademik, media, dan laporan riset terkait oligarki, demokratisasi, serta praktik korupsi politik di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik politik kartel dan kongkalikong menyebabkan erosi kualitas demokrasi, marginalisasi kepentingan publik, serta delegitimasi sistem politik. Selain itu, praktik tersebut memperkuat oligarki politik-ekonomi yang berimplikasi terhadap meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi institusional, penguatan masyarakat sipil, serta transparansi pembiayaan politik sebagai langkah strategis untuk mengatasi dominasi kartel politik dan kongkalikong dalam sistem politik Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Asep Rohmandar

President Sundaland Researcher Society

E-mail: rasep7029@gmail.com

PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia pasca-Reformasi 1998 menghadapi tantangan serius dalam bentuk praktik politik kartel dan kongkalikong yang mengancam substansi demokratisasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa transisi dari rezim otoriter Orde Baru tidak secara otomatis menghasilkan sistem politik yang sehat dan kompetitif. Sebaliknya, yang terjadi adalah transformasi pola dominasi politik dari oligarki tunggal menjadi kartel oligarki yang lebih kompleks dan tersembunyi.

Politik kartel merujuk pada praktik kolusi antarpolisi yang seharusnya berkompetisi, namun justru bekerja sama untuk membagi kekuasaan dan sumber daya negara. Sementara itu, kongkalikong menggambarkan praktik kolusi yang lebih luas antara aktor politik, pengusaha, dan birokrat untuk kepentingan mutual yang merugikan kepentingan publik. Kedua fenomena ini telah menjadi karakteristik utama sistem politik Indonesia kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data dikumpulkan dari berbagai literatur akademik, artikel jurnal, buku, laporan penelitian, serta sumber daring terpercaya yang membahas fenomena oligarki, politik kartel, dan praktik kongkalikong di Indonesia. Analisis dilakukan melalui kajian literatur komprehensif dengan menekankan pada kerangka teoretis tentang oligarki dan kartelisasi politik, serta menghubungkannya dengan realitas politik kontemporer di Indonesia. Teknik analisis data dilakukan dengan model analisis isi (content analysis), yaitu mengidentifikasi tema-tema utama, pola praktik kekuasaan, serta dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Validitas data diperkuat dengan melakukan triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari literatur akademik dengan data empiris berupa laporan media dan hasil riset lembaga independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Teoretis Politik Kartel dan Kongkalikong

1. Definisi dan Karakteristik Politik Kartel

Politik kartel dalam konteks Indonesia dapat dipahami sebagai sistem politik di mana partai-partai politik yang seharusnya saling berkompetisi justru membentuk kesepakatan informal untuk membagi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya negara. Konsep ini diadaptasi dari teori ekonomi tentang kartel bisnis, namun diterapkan dalam ranah politik.



Karakteristik utama politik kartel meliputi: pertama, pembagian kekuasaan yang tidak didasarkan pada kompetisi ideologis atau programatik, melainkan pada kesepakatan pragmatis untuk berbagi akses terhadap sumber daya negara. Kedua, minimnya perbedaan substansial antara partai-partai politik dalam hal kebijakan publik. Ketiga, praktik kooptasi terhadap partai-partai kecil atau oposisi melalui pemberian jabatan atau akses ekonomi.

2. Kongkalikong sebagai Praktik Kolusi Politik

Kongkalikong merupakan istilah yang berasal dari bahasa Hokkien yang berarti "bekerja sama secara diam-diam" atau kolusi. Dalam konteks politik Indonesia, kongkalikong merujuk pada praktik kolusi yang melibatkan berbagai aktor untuk kepentingan mutual yang seringkali merugikan kepentingan publik. Praktik kongkalikong dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari suap-menyuap dalam pengambilan keputusan politik, kolusi dalam tender proyek pemerintah, hingga manipulasi regulasi untuk menguntungkan kelompok tertentu. Kongkalikong juga meliputi praktik jual-beli jabatan politik dan pertukaran dukungan politik dengan keuntungan ekonomi.

B. Akar Historis dan Evolusi Politik Kartel di Indonesia

1. Warisan Orde Baru dan Transformasi Oligarki

Praktik politik kartel dan kongkalikong di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari warisan sistem politik Orde Baru yang otoriter-korporatis. Selama 32 tahun berkuasa, rezim Soeharto membangun sistem politik yang menggabungkan kontrol politik ketat dengan patronase ekonomi yang luas. Jatuhnya Soeharto pada 1998 tidak menghilangkan struktur oligarki yang telah mapan, melainkan membuatnya bertransformasi.

Jeffrey Winters, seorang ahli politik yang mengkaji oligarki Indonesia, menjelaskan bahwa pasca-Reformasi, Indonesia mengalami transformasi dari "oligarki penguasa" (ruling oligarchy) menjadi "oligarki sipil" (civil oligarchy). Dalam sistem oligarki sipil, kekuasaan tidak lagi terpusat pada satu figur otokratik, namun tersebar di antara berbagai aktor oligarkis yang membentuk kartel untuk melindungi kepentingan kolektif mereka.

2. Demokratisasi dan Munculnya Kartel Partai

Proses demokratisasi pasca-1998 membuka ruang bagi munculnya sistem multipartai. Namun, alih-alih menghasilkan kompetisi politik yang sehat, yang terjadi adalah pembentukan kartel antarpartai politik. Partai-partai politik yang seharusnya menjadi representasi kepentingan masyarakat justru menjadi kendaraan bagi kepentingan oligarki. Boni Hargens dalam tesisnya tentang "Kartel Oligarki di Indonesia Post-Soeharto" menjelaskan bahwa pasca-Reformasi, terjadi proses perkawinan silang antara oligarki dan partai politik kartel. Oligarki ekonomi yang telah mapan sejak era Orde Baru memanfaatkan partai politik sebagai kendaraan untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh mereka dalam sistem politik yang baru.

C. Manifestasi Praktik Politik Kartel dan Kongkalikong

1. Kartelisasi dalam Sistem Presidensial Multipartai

Sistem presidensial multipartai di Indonesia menghadapi paradoks yang menarik. Di satu sisi, sistem ini dirancang untuk menciptakan checks and balances antara eksekutif dan legislatif. Namun di sisi lain, praktik kartel politik membuat sistem ini justru menghasilkan koalisi "gemuk" yang meminimalkan oposisi dan kritik terhadap pemerintah. Fenomena ini



terlihat jelas dalam pembentukan koalisi pemerintahan pasca-pemilu. Partai-partai politik, terlepas dari perbedaan ideologis atau programatik, cenderung bergabung dalam koalisi pemerintahan untuk mendapatkan akses terhadap jabatan-jabatan strategis. Hal ini menciptakan situasi di mana hampir tidak ada oposisi yang efektif di parlemen.

2. Oligarki Partai Politik dan Sentralisasi Kekuasaan

Partai politik di Indonesia dikuasai oleh kelompok tertentu yang merupakan keturunan, keluarga, klik, yang membentuk elit yang menguasai Parpol. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokratisasi internal partai politik masih sangat lemah. Kepemimpinan partai cenderung tersentralisasi pada figur-figur tertentu yang memiliki modal ekonomi dan jaringan politik yang kuat. Sentralisasi kekuasaan dalam partai politik ini berdampak pada lemahnya representasi kepentingan masyarakat. Partai politik lebih menjadi kendaraan kepentingan elit daripada saluran aspirasi rakyat. Hal ini juga memperkuat praktik kongkalikong karena keputusan-keputusan penting hanya melibatkan segelintir elit partai.

3. Kongkalikong dalam Sektor Ekonomi dan Bisnis

Praktik kongkalikong tidak hanya terjadi dalam ranah politik murni, namun juga merambah ke sektor ekonomi dan bisnis. Praktik kongkalikong pengusaha dengan politik ini adalah sangat tidak fair dan akan merusak mekanisme pasar. Kolusi antara pengusaha dan politisi menciptakan monopoli atau oligopoli yang merugikan persaingan usaha yang sehat.

Contoh konkret praktik kongkalikong dapat dilihat dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pengusaha. Sektor pertambangan batu bara telah menjadi komoditas politik dan sumber pendanaan kampanye politik di Indonesia selama 20 tahun terakhir baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini menunjukkan bagaimana sektor ekonomi strategis dijadikan sumber pendanaan politik yang kemudian menciptakan lingkaran setan korupsi.

D. Dampak Politik Kartel dan Kongkalikong Terhadap Demokrasi

1. Erosi Kualitas Demokrasi

Praktik politik kartel dan kongkalikong berdampak serius terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Pertama, praktik ini mengikis makna kompetisi politik yang sehat. Ketika partai-partai politik membentuk kartel, pilihan kebijakan publik menjadi terbatas karena tidak ada perbedaan substansial antara partai-partai tersebut. Kedua, praktik ini melemahkan fungsi kontrol dan pengawasan politik. Parlemen yang seharusnya menjadi lembaga pengawas terhadap eksekutif justru menjadi mitra koalisi yang cenderung mendukung kebijakan pemerintah tanpa kritik yang memadai. Hal ini mengurangi akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat.

2. Marginalisasi Kepentingan Publik

Politik kartel dan kongkalikong cenderung mengutamakan kepentingan elit politik dan ekonomi daripada kepentingan publik. Kebijakan-kebijakan publik seringkali dirancang untuk menguntungkan kelompok-kelompok yang memiliki akses dan pengaruh dalam kartel politik, sementara kepentingan masyarakat luas terabaikan. Fenomena ini terlihat dalam berbagai kebijakan ekonomi yang cenderung menguntungkan konglomerat besar daripada usaha kecil dan menengah. Kebijakan fiskal juga seringkali dirancang untuk memenuhi kepentingan elit politik melalui proyek-proyek yang sarat dengan praktik korupsi.



3. Delegitimasi Sistem Politik

Praktik politik kartel dan kongkalikong juga berdampak pada legitimasi sistem politik secara keseluruhan. Ketika masyarakat melihat bahwa sistem politik hanya menguntungkan segelintir elit, kepercayaan terhadap institusi-institusi politik akan menurun. Hal ini dapat mengancam stabilitas demokrasi dalam jangka panjang. Survei-survei opini publik menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan parlemen yang cenderung rendah. Hal ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja sistem politik yang dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan mereka.

E. Studi Kasus: Manifestasi Konkret Politik Kartel dan Kongkalikong

1. Kasus Pilkada dan Oligarki Lokal

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi arena yang sangat jelas menunjukkan praktik politik kartel dan kongkalikong. Partai politik mempunyai kewenangan untuk mengusung calon dalam Pilkada, namun kewenangan ini seringkali disalahgunakan untuk kepentingan transaksional. Praktik jual-beli tiket partai politik untuk pencalonan dalam Pilkada telah menjadi rahasia umum. Calon-calon yang memiliki modal ekonomi yang besar dapat dengan mudah mendapatkan dukungan dari berbagai partai politik, terlepas dari kualitas dan integritas mereka. Hal ini menciptakan oligarki lokal yang menguasai pemerintahan daerah.

2. Kongkalikong dalam Proyek Infrastruktur

Proyek-proyek infrastruktur besar seringkali menjadi ajang praktik kongkalikong antara pejabat publik, politisi, dan pengusaha. Adanya dugaan praktik kartel pipa di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) senilai hampir Rp 1 triliun menunjukkan betapa masifnya praktik kolusi dalam proyek-proyek strategis.

Praktik kongkalikong dalam proyek infrastruktur tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada kualitas infrastruktur yang dibangun. Ketika proyek-proyek tersebut dikerjakan berdasarkan hubungan kolusi daripada kompetensi dan kualitas, hasil yang diperoleh seringkali tidak optimal.

3. Kartel dalam Industri Media dan Manipulasi Opini

Bisa memiliki perwakilan di parlemen dan pemerintahan lewat partai politik sekaligus memanipulasi opini publik melalui media massa yang dikuasai. Fenomena oligarki yang menguasai sekaligus partai politik dan media massa menciptakan potensi manipulasi opini publik yang sangat besar. Ketika pemilik media massa juga merupakan pemilik atau pendukung utama partai politik tertentu, independensi media menjadi dipertanyakan. Media yang seharusnya menjadi watchdog bagi kekuasaan justru menjadi alat propaganda untuk kepentingan politik tertentu.

F. Faktor-Faktor Penyebab Persistensi Politik Kartel dan Kongkalikong

1. Lemahnya Institusi Penegak Hukum

Salah satu faktor utama yang memungkinkan praktik politik kartel dan kongkalikong bertahan adalah lemahnya institusi penegak hukum. Meskipun Indonesia memiliki berbagai lembaga anti-korupsi seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, namun penegakan hukum terhadap praktik-praktik kongkalikong masih belum optimal. Lemahnya penegakan hukum ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan sumber daya, interferensi politik,



hingga praktik korupsi di dalam institusi penegak hukum itu sendiri. Situasi ini menciptakan impunitas bagi pelaku praktik kartel dan kongkalikong.

2. Sistem Pembiayaan Politik yang Tidak Transparan

Sistem pembiayaan politik di Indonesia masih sangat tidak transparan. Partai politik dan kandidat politik seringkali mengandalkan sumbangan dari pengusaha atau kelompok kepentingan tertentu. Hal ini menciptakan ketergantungan politik terhadap penyandang dana yang kemudian dapat mempengaruhi kebijakan publik. Ketidaktransparanan dalam pembiayaan politik ini memungkinkan praktik kongkalikong antara politisi dan pengusaha. Penyandang dana mengharapkan timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan mereka, sementara politisi memerlukan dukungan finansial untuk mempertahankan kekuasaan.

3. Budaya Politik Patrimonial

Budaya politik patrimonial yang masih kuat di Indonesia juga menjadi faktor yang mendorong praktik politik kartel dan kongkalikong. Budaya ini menganggap bahwa kekuasaan politik dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, bukan untuk kepentingan publik. Budaya patrimonial ini tercermin dalam praktik nepotisme, kronisme, dan korupsi yang masih merajalela. Pejabat publik cenderung menggunakan jabatan mereka untuk menguntungkan keluarga, teman, atau kelompok tertentu, daripada melayani kepentingan masyarakat luas.

G. Dampak Jangka Panjang dan Tantangan Masa Depan

1. Ancaman Terhadap Konsolidasi Demokrasi

Praktik politik kartel dan kongkalikong yang terus berlanjut mengancam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang seharusnya menghasilkan pemerintahan yang akuntabel dan responsif justru menghasilkan sistem politik yang didominasi oleh kartel elit. Jika praktik ini terus berlanjut, Indonesia berisiko mengalami kemunduran demokrasi (democratic backsliding) di mana institusi-institusi demokratis kehilangan substansi dan hanya menjadi formalitas. Hal ini dapat mengancam stabilitas politik dan sosial dalam jangka panjang.

2. Ketimpangan Ekonomi dan Sosial

Politik kartel dan kongkalikong juga berkontribusi terhadap ketimpangan ekonomi dan sosial yang semakin melebar. Ketika kebijakan ekonomi dirancang untuk menguntungkan segelintir elit, akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi menjadi terbatas. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan politik. Masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi juga cenderung tidak memiliki akses yang memadai untuk berpartisipasi dalam proses politik.

3. Tantangan Reformasi Institusional

Mengatasi praktik politik kartel dan kongkalikong memerlukan reformasi institusional yang komprehensif. Reformasi ini harus menyentuh berbagai aspek, mulai dari sistem pemilu, sistem kepartaian, hingga sistem penegakan hukum. Namun, reformasi institusional ini menghadapi tantangan yang sangat besar karena harus berhadapan dengan kepentingan-kepentingan yang telah mapan. Elit-elit politik yang diuntungkan oleh sistem yang ada akan berusaha mempertahankan status quo.



H. Strategi Penanggulangan dan Reformasi

1. Penguatan Sistem Hukum dan Penegakan Hukum

Kebijakan antikorupsi yang kuat dan menyapu seluruh kalangan menjadi langkah fundamental dalam mengatasi praktik politik kartel dan kongkalikong. Penguatan institusi penegak hukum, baik dari segi kewenangan, sumber daya, maupun independensi, sangat diperlukan untuk menciptakan efek jera. Sistem hukum yang kuat harus didukung dengan regulasi yang komprehensif untuk mengatur praktik-praktik politik dan bisnis yang berpotensi mengarah pada kongkalikong. Hal ini termasuk regulasi tentang transparansi pembiayaan politik, konflik kepentingan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Reformasi Sistem Kepartaian

Reformasi sistem kepartaian menjadi kunci untuk mengatasi praktik politik kartel. Reformasi ini harus mencakup demokratisasi internal partai, transparansi keuangan partai, dan penguatan fungsi representasi partai politik. Demokratisasi internal partai dapat dilakukan melalui mekanisme pemilihan pemimpin partai yang demokratis dan partisipatif. Transparansi keuangan partai dapat diwujudkan melalui audit publik terhadap sumber dana dan penggunaan dana partai. Sementara itu, penguatan fungsi representasi dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas kader partai dan program-program yang responsif terhadap kepentingan masyarakat.

3. Penguatan Masyarakat Sipil dan Gerakan Sosial

Gerakan sosial akan menumbuhkan kesadaran masyarakat mencegah oligark berkuasa. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi praktik-praktik politik kartel dan kongkalikong. Organisasi masyarakat sipil dapat menjadi kekuatan penyeimbang yang mengontrol kekuasaan politik. Penguatan masyarakat sipil dapat dilakukan melalui peningkatan literasi politik, pengembangan kapasitas organisasi masyarakat sipil, dan penciptaan ruang partisipasi publik yang lebih luas. Gerakan sosial yang kuat akan menciptakan tekanan publik yang dapat memaksa elit politik untuk lebih akuntabel.

4. Reformasi Sistem Pemilu dan Representasi

Reformasi sistem pemilu juga diperlukan untuk mengurangi praktik politik kartel. Sistem pemilu yang ada saat ini masih memungkinkan praktik jual-beli suara dan manipulasi hasil pemilu. Reformasi dapat dilakukan melalui perbaikan sistem administrasi pemilu, peningkatan transparansi, dan penguatan mekanisme pengawasan. Selain itu, sistem representasi politik juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat benar-benar terwakili dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik yang lebih intensif dan partisipatif.

KESIMPULAN

Praktik politik kartel dan kongkalikong telah menjadi karakteristik utama sistem politik Indonesia pasca-Reformasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokratisasi tidak secara otomatis menghasilkan sistem politik yang sehat dan kompetitif, melainkan dapat menciptakan bentuk-bentuk dominasi politik yang baru. Politik kartel dan kongkalikong berdampak serius terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Praktik ini mengikis makna kompetisi politik, melemahkan fungsi kontrol dan pengawasan, serta marginalisasi kepentingan publik. Jika



dibiarkan terus berlanjut, praktik ini dapat mengancam konsolidasi demokrasi dan stabilitas sosial-politik Indonesia.

Mengatasi praktik politik kartel dan kongkalikong memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya ini harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, hingga masyarakat luas. Reformasi institusional yang menyeluruh, penguatan sistem hukum, dan penguatan masyarakat sipil menjadi kunci untuk menciptakan sistem politik yang lebih demokratis dan akuntabel. Tantangan ke depan adalah bagaimana membangun momentum reformasi politik yang dapat mengatasi resistensi dari kepentingan-kepentingan yang telah mapan. Hal ini memerlukan kepemimpinan politik yang kuat, dukungan masyarakat yang luas, dan komitmen jangka panjang untuk menciptakan perubahan yang fundamental dalam sistem politik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward. (2019). "Indonesia's Election and the Return of Ideological Competition." *Journal of Democracy* , 30(4), 94-108.
- Butt, Simon. (2015). "Anti-Corruption Agencies in Indonesia and Australia: A Comparison." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(2), 255-274.
- Hadiz, Vedi R. (2016). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hargens, Boni. (2018). "Kartel Oligarki di Indonesia Post-Soeharto: Transformasi Kekuasaan dan Kontinuitas." *Jurnal Politik Indonesia*, 3(2), 45-67.
- Hasan, Noorhaidi. (2012). "Islamist Party, Electoral Politics and Da'wa Mobilization among Urban Muslims: The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia." *Journal of Asian Studies*, 71(4), 91-109.
- Kompas.id. (2023). "Petugas Partai dan Kartel Politik." Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/09/petugas-partai-dan-kartel-politik>
- Kontan.co.id. (2014). "Kongkalikong Politik dan Pemburu Rente." Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/kongkalikong-politik-dan-pemburu-rente>
- Mietzner, Marcus. (2020). "Populist Anti-Establishment Rhetoric in Democratizing Indonesia." *Political Studies*, 68(2), 393-411.
- Muhtadi, Burhanuddin. (2019). *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Power, Thomas P. (2018). "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307-338.



- Robison, Richard & Hadiz, Vedi R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarki in an Age of Markets*. London: Routledge.
- Slater, Dan. (2018). "Party Cartelisation, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and the Contingency of Democratic Opposition." *Journal of East Asian Studies*, 18(1), 23-46.
- Tempo.co. (2023). "Panduan Singkat Menjadi Oligark." Diakses dari <https://www.tempo.co/kolom/kekuatan-oligarki-haji-isam-1543262>
- Timo, Edy. (2019). "Oligarki dalam Sistem Kepartaian Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 34-48.
- Winters, Jeffrey A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Winters, Jeffrey A. (2013). "Oligarchy and Democracy in Indonesia." *Indonesia*, 96, 11-33.